



KEMENTERIAN KEUANGAN



Pokok Pokok Kebijakan Belanja dalam Pagu Indikatif tahun 2020

**Disampaikan oleh:
Direktur Jenderal Anggaran**

**Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
Jakarta, 30 April 2019**



OUTLINE

1

Pengantar

2

Kebijakan Belanja K/L

3

Pagu Indikatif Belanja K/L 2020

4

Tindak Lanjut yang Harus Dilaksanakan

5

Penutup

Fokus dan Arah Kebijakan APBN 2020

diarahkan untuk mendukung

Tema:

**“APBN untuk Akselerasi
Daya Saing melalui
Inovasi dan Penguatan
Kualitas SDM”**



Strategi:



Mobilisasi Pendapatan Yang Inovatif

1. Reformasi perpajakan untuk merespon ekonomi digital
2. Insentif fiskal untuk mendorong daya saing investasi dan ekspor



Belanja Negara Yang Lebih Efektif

1. Penguatan daya saing SDM
2. Program perlindungan sosial yang komprehensif: sinergi dan integrasi
3. Penguatan sinergi dan perbaikan kualitas implementasi desentralisasi fiskal



Pembiayaan Yang Kreatif

1. Pembiayaan kreatif dan inovatif yang mengikutsertakan peran swasta
2. Penguatan efektifitas peran quasi fiskal sebagai agent development (BUMN & BLU)

Belanja Pemerintah Pusat tahun 2020

didorong untuk lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan

1 SDM yang berkualitas

- Kesehatan
 - Efektivitas program JKN
 - Konvergensi penurunan stunting
- Pendidikan
 - skill, entrepreneurship, penguasaan ICT
 - KIP Kuliah dan Kartu Prakerja
- Kesejahteraan
 - Menjaga daya beli
 - Kartu sembako

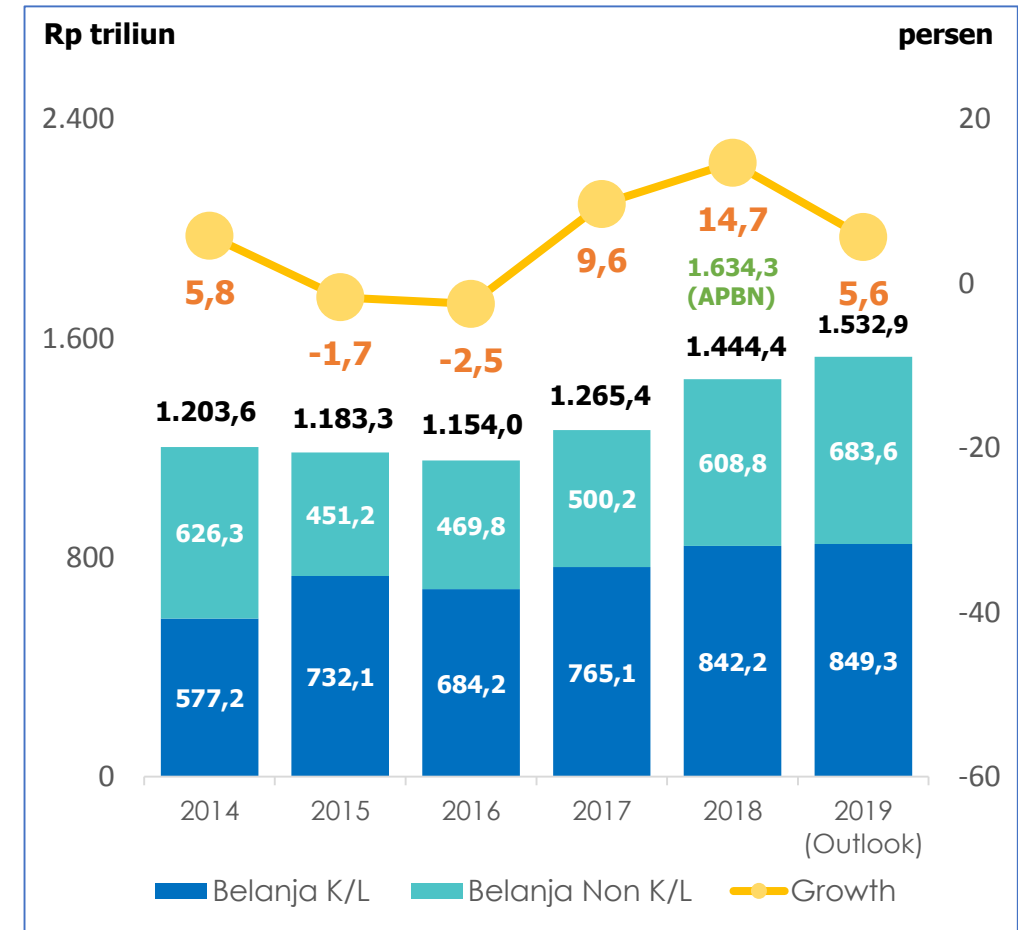
3 Akselerasi Infrastruktur

- Transformasi industrialisasi (pangan, energi, air, konektivitas)
- Infrastruktur perkotaan (air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan transportasi massal)
- Skema pembiayaan kreatif (KPBU AP)

2 Birokrasi yang efisien dan melayani

- Produktivitas, integritas, dan pelayanan publik
- Reformasi gaji dan skema pension
- Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT
- Integrasi tunjangan kinerja dengan alokasi konsinyering dan RDK

4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah bencana



Kebijakan Umum Belanja K/L



Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan



Mempertajam prioritas penganggaran untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional



Mendukung penguatan daya saing SDM dan perlindungan sosial



Mempertajam program dan kegiatan oleh semua K/L, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

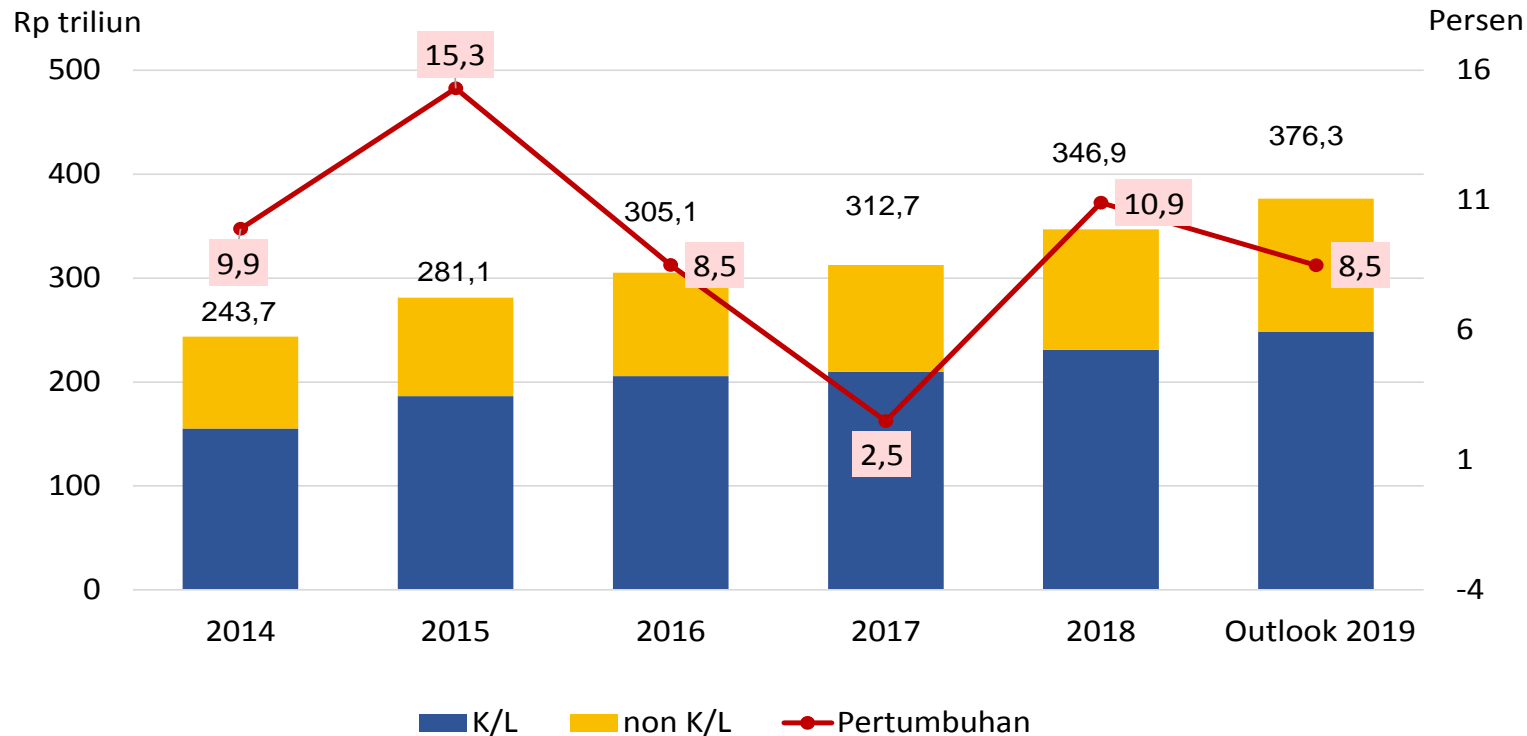


Memperkuat sinergi dan koordinasi antara K/L, Pemerintah Daerah, dan instansi lainnya

Belanja Pegawai diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi

serta memperhatikan kesejahteraan pensiunan aparatur negara melalui reformasi program pensiun

Belanja pegawai 2014-2019 rata-rata tumbuh 9,3 persen per tahun



1. Belanja Pegawai K/L 2020

memperhitungkan :

- Peningkatan program reformasi birokrasi di K/L
- Kebijakan penerimaan pegawai baru
- Mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada (gaji ke 13 dan THR)

2. Belanja Pegawai Non K/L 2020

terutama untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pensiun.

2015 tumbuh 15,3% :

- Gaji pokok naik rata-rata 6%
- Pensiun pokok naik rata-rata 4%
- Uang makan dan Uang Lauk Pauk

2017 tumbuh hanya 2,5% :

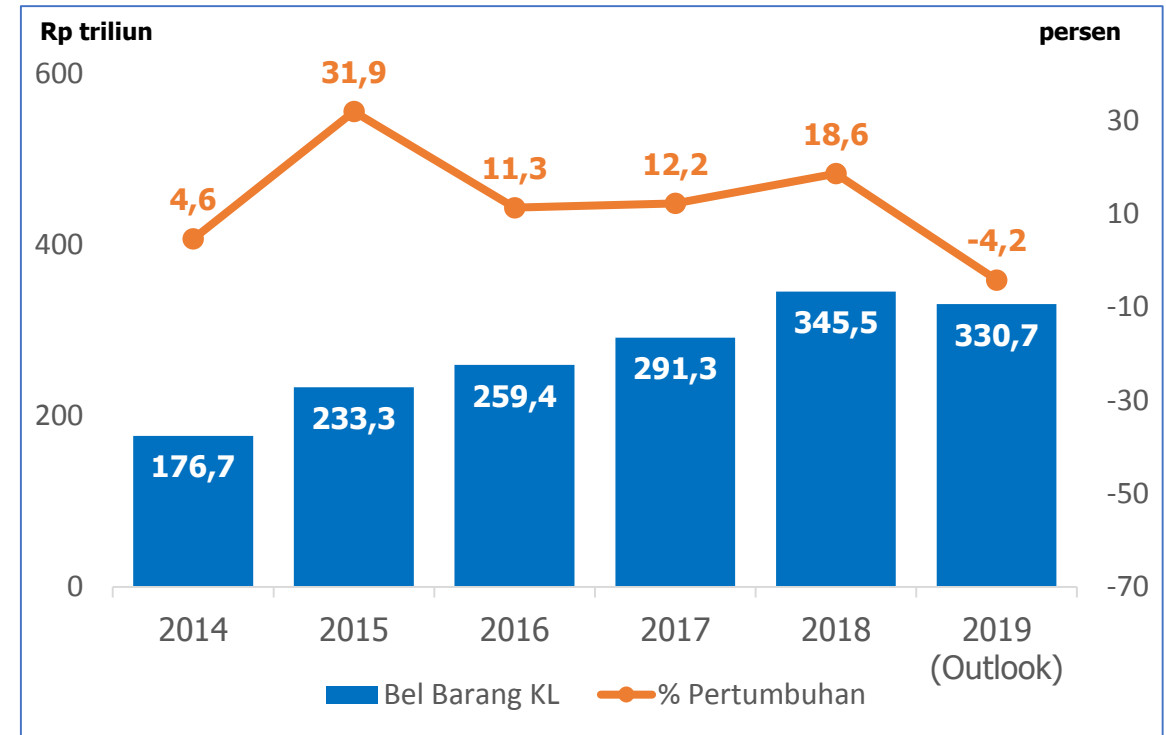
- Uang makan dan Uang Lauk Pauk

2019 tumbuh 8,5% :

- Gaji Pokok naik 5%

Penajaman Belanja Barang Terutama Pada Belanja Barang NonOperasional

1. Penghematan belanja honorarium, perjalanan dinas, dan paket *meeting*, pembatasan Rapat Dalam Kantor (RDK) dan konsinyering bagi K/L → sama sekitar realisasi 2017
2. Penajaman dan sinkronisasi Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
3. Mendukung program strategis, yaitu pelaksanaan PON Papua dan Sensus Penduduk
4. Penajaman proyek KPBU dengan memberikan dukungan melalui fasilitasi penyiapan proyek (PDF) dan dukungan kelayakan proyek (VGF)
5. Mendukung mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. Pengembangan SDM melalui pelatihan vokasi, **termasuk inisiatif kartu prakerja**



2015

tumbuh 31,9%

- Kebijakan reklasifikasi belanja barang, belanja bansos dan belanja modal menjadi belanja barang.

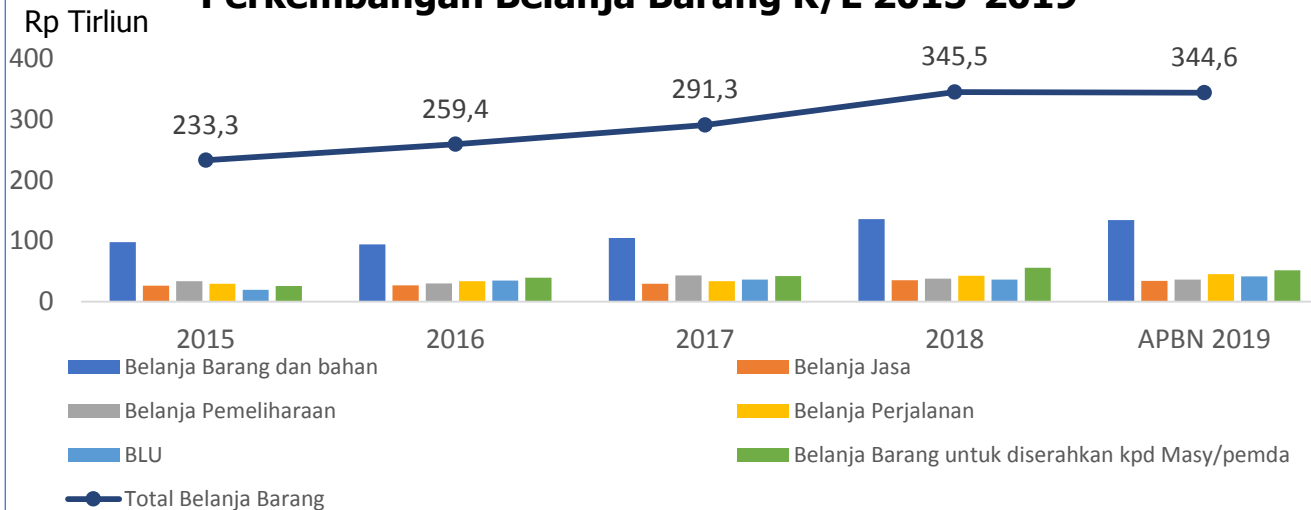
2018

tumbuh 18,6%

- Pelaksanaan Asian Games, dan para Asian Games di Jakarta dan Palembang,
- Pelaksanaan Annual Meeting IMF-WB di Bali, dan
- Persiapan Pemilu 2019

Upaya peningkatan efisiensi Belanja Barang terus dilakukan

Perkembangan Belanja Barang K/L 2015-2019



Efisiensi dapat dilakukan pada :

Belanja Barang dan bahan (mengalami kenaikan sekitar **Rp36,3 T** dari tahun 2015–2019) a.l. untuk :

- Listrik, air, internet, telepon, ATK, honorarium, dan belanja yang tidak terkait prioritas nasional
- Pemberian BOS

Belanja Jasa (yang mengalami kenaikan sekitar **Rp8,3 T** dari tahun 2015–2019) a.l. untuk :

- Jasa konsultan
- Jasa profesi
- Sewa gedung, kendaraan, perlengkapan kantor

Belanja Perjalanan (yang mengalami kenaikan sekitar **Rp15,8 T** dari tahun 2015–2019) a.l. untuk :

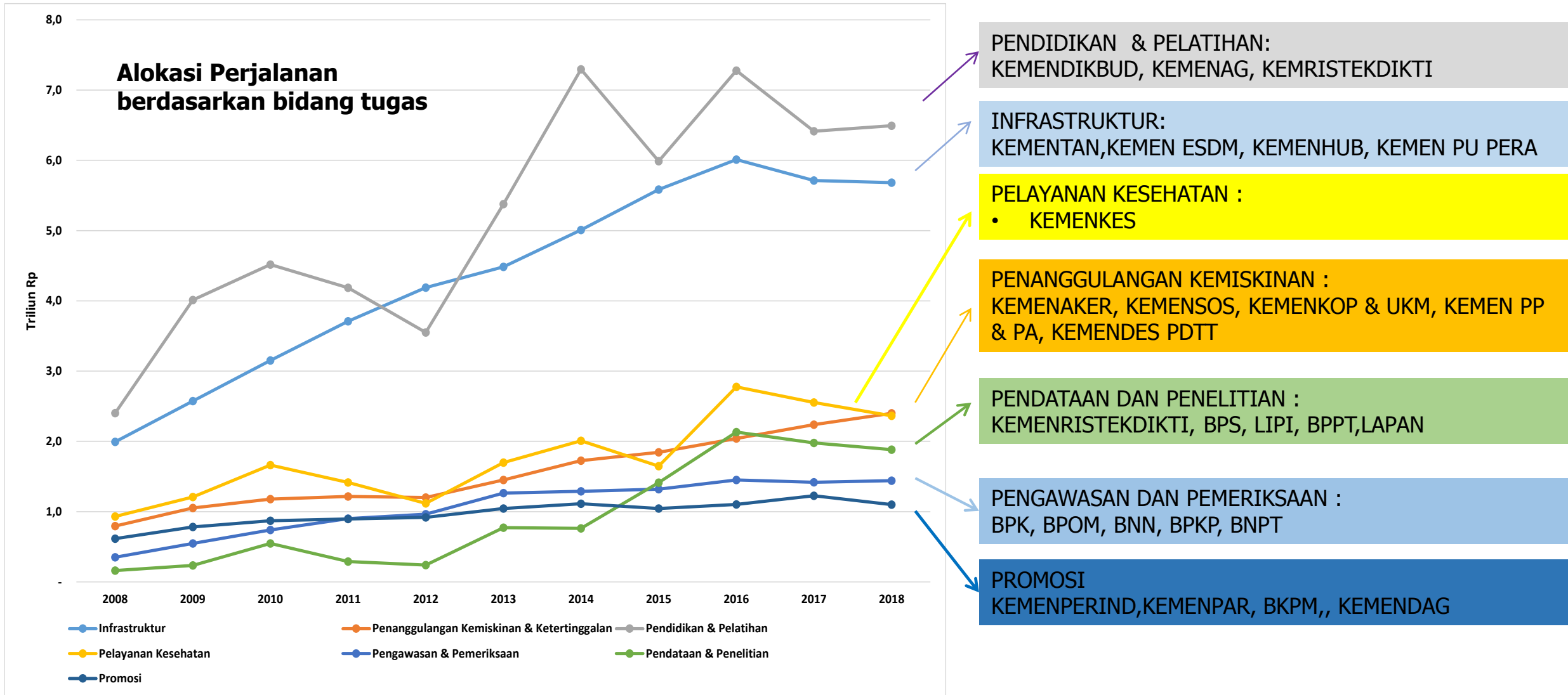
- Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang tidak terkait langsung dengan prioritas nasional , paket meeting

Belanja Barang utk diserahkan kpd masyarakat/Pemda (yang mengalami kenaikan sekitar **Rp25,8 T** dari tahun 2015–2019) a.l. untuk :

- Alat dan mesin tertentu (pertanian, produksi)
- Bangunan tertentu (pasar, gudang)

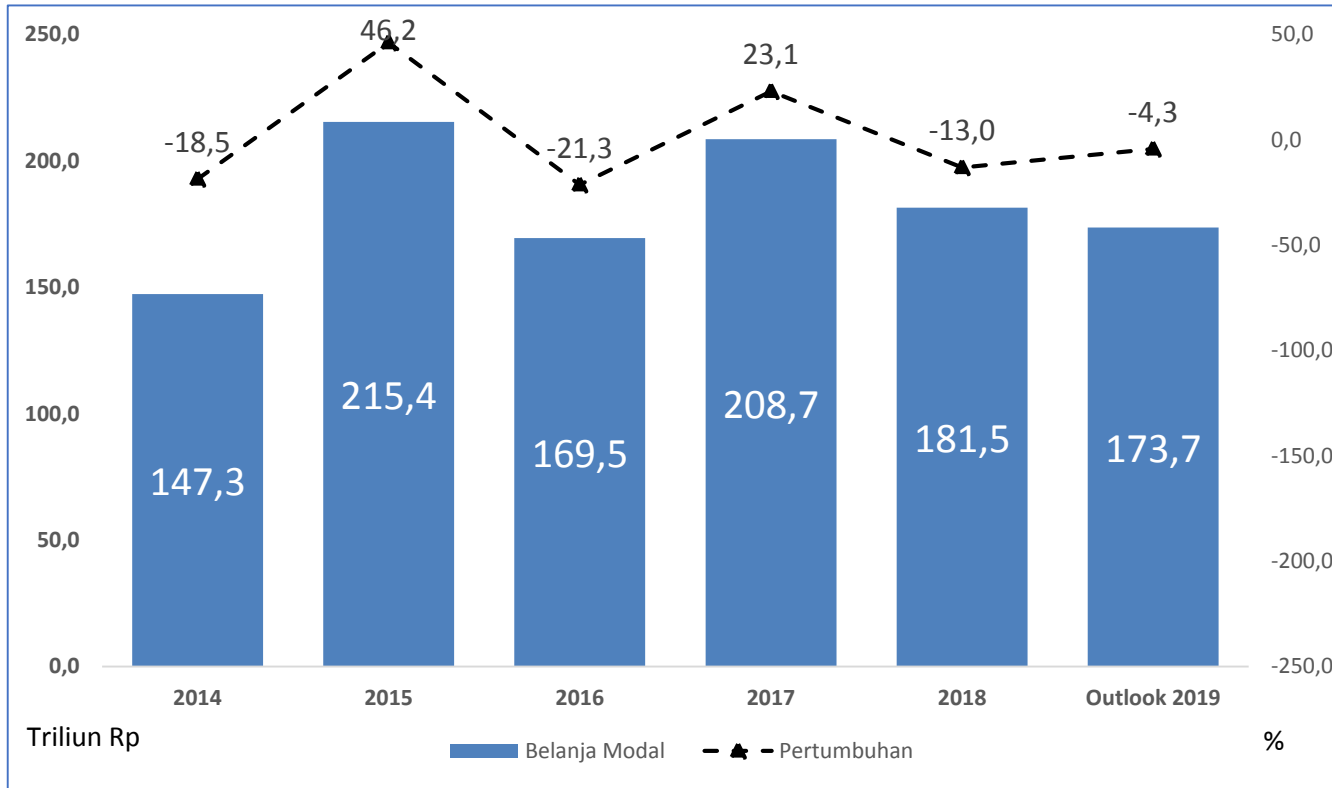
Uraian (Rp T)	2015	2016	2017	2018	APBN 2019
Belanja Barang dan bahan	98,1	94,4	105,1	136,1	134,4
Belanja Jasa	26,3	26,8	29,6	35,7	34,6
Belanja Pemeliharaan	33,8	30,3	43,5	38,2	36,7
Belanja Perjalanan	29,6	33,7	34,1	42,7	45,4
BLU	19,4	34,7	36,6	36,7	41,7
Belanja Barang untuk diserahkan kpd Masy/pemda	26,1	39,5	42,3	56,1	51,9
Total Belanja Barang	233,3	259,4	291,3	345,5	344,6

Pola belanja perjadin dan paket meeting dirinci menurut bidang tugas yg perlu dilihat lagi efisiensinya



Refocusing Belanja Modal Tahun 2014-2019

Untuk Mewujudkan Pengembangan Kapasitas Produksi dan Konektivitas Antarwilayah



2015 tumbuh 46,2%:



Pemerintahan baru mendorong pembangunan infrastruktur

2017 tumbuh 23,1% :



Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur



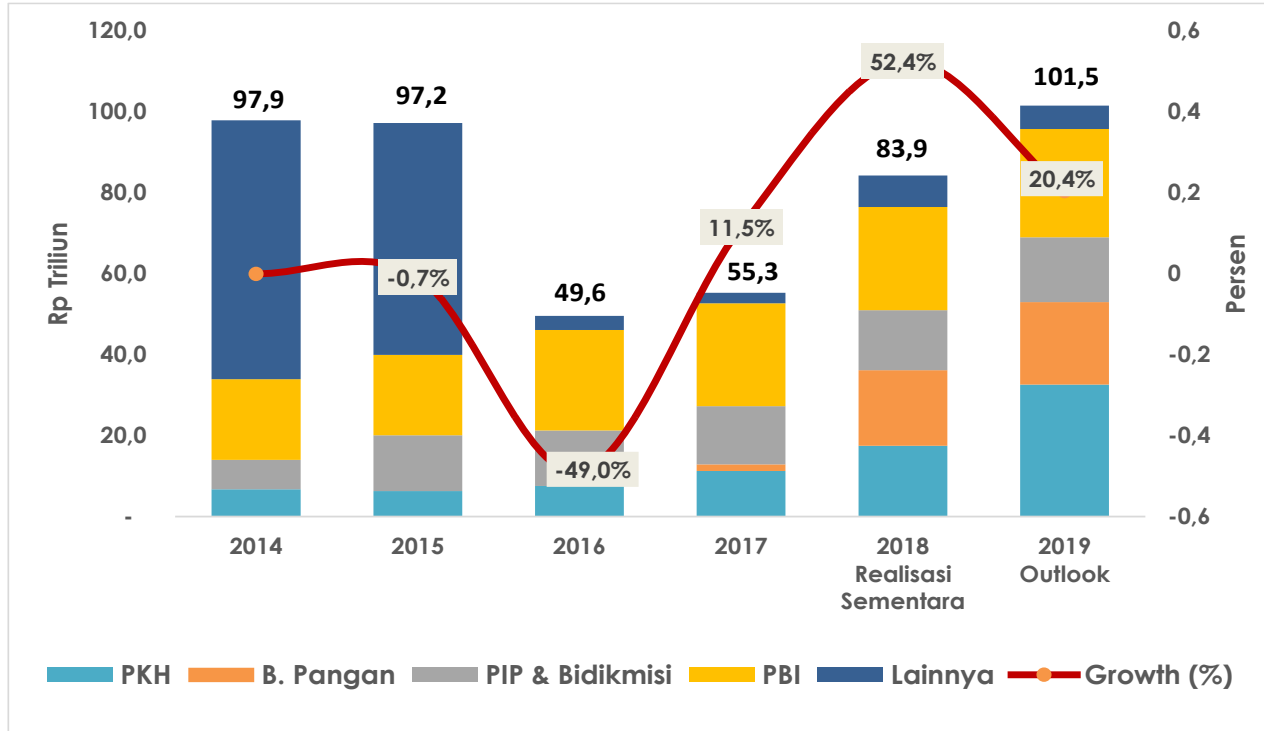
Penyiapan kegiatan strategis: Asian Games, dan Pemilu 2019

Kebijakan Belanja Modal Tahun 2020:

1. Meningkatkan belanja modal yang terkait infrastruktur (a.l. Kemen PUPR, Kemenhub, KESDM)
2. Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur logistik, dan integrasi antarmoda
3. Pengembangan transportasi dasar pada kawasan perbatasan dan tertinggal,
4. Mendukung industrialisasi,
5. Peningkatan sinkronisasi alokasi belanja modal di K/L dengan alokasi TKDD, pembiayaan infrastruktur, dan KPBU

Peningkatan Perlindungan Sosial sebagai Wujud Keberpihakan Pemerintah Kepada Masyarakat Miskin

Perlu perbaikan dari sisi ketepatan sasaran, efektivitas dan efisiensi, serta dukungan bagi disabilitas serta lansia

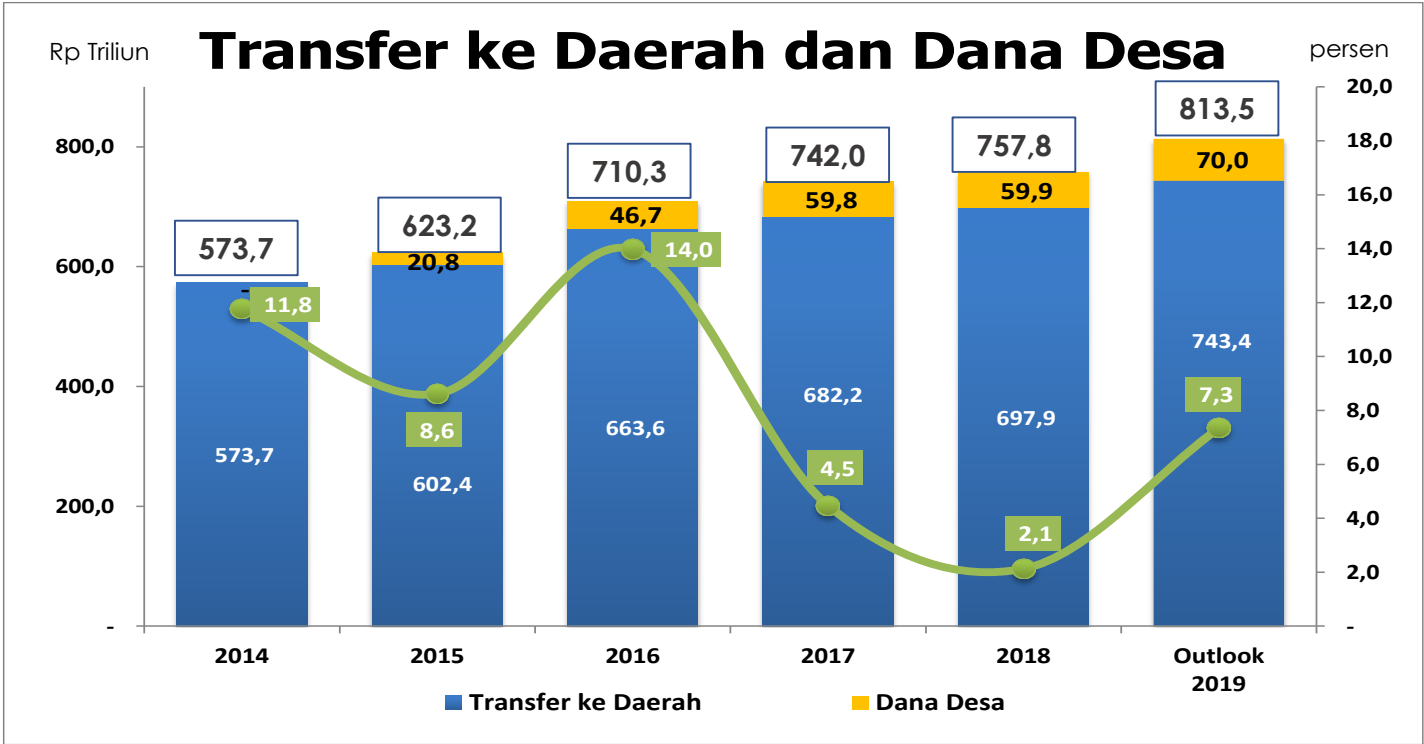


Ket:

- Perlinsos yang hanya berasal dari jenis belanja bantuan sosial. tidak termasuk: Dana desa, subsidi, dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

- Peningkatan **ketepatan sasaran** menggunakan single data, pemanfaatan Information, Communications and Technology (ICT), serta penguatan monev
- Integrasi dan sinergi program program-bantuan sosial:
 - Memperkuat Program Keluarga Harapan (**PKH**)→kesehatan, disabilitas dan lansia
 - Perbaiki kualitas data **PBI** (BPJS Kesehatan, Kemensos, dan Kemenkes)
 - Perbaiki kualitas **BPNT** melalui **Kartu Sembako**
 - Peningkatan bantuan pendidikan melalui program **KIP Kuliah**

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas dasar layanan publik, penguatan SDM, dan akselerasi daya saing → perlu disinkronkan dengan Belanja K/L



Kebijakan TKDD 2020 yang perlu disinkronisasi dengan Program/Kegiatan K/L

1. Memastikan Pemda melaksanakan tugasnya dlm pembangunan infrastruktur utk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar publik di daerah
2. Penguatan kebijakan DAK Fisik afirmasi kepada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik utamanya untuk infrastruktur konektivitas.
3. Memperkuat pengalokasian DAK Nonfisik berbasis kinerja, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
4. Peningkatan DID untuk memacu kinerja Pemda.
5. Penguatan Dana Desa dan pengawasannya.

Kinerja pelayanan umum relatif membaik



Air Minum Layak (%)`



Sanitasi Layak (%)



Harapan Lama Sekolah (tahun)



Kelahiran di tolong tenaga kesehatan (%)

2014

68,4

61,1

12,39

87,1

2017

72,0

67,9

12,72

93,3

Kebijakan Prioritas Penganggaran Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, utamanya:



Kesehatan

- Konvergensi penurunan *stunting*
- Program JKN



Kesejahteraan

- Akselerasi pengentasan kemiskinan
- PKH, BPNT, Kartu sembako



Keterampilan/ Pendidikan

- *skill, entrepreneurship*, penguasaan ICT
- KIP Kuliah, KIP dasar & Menengah
- Kartu Pra Kerja



Akselerasi Infrastruktur

- **Transformasi industrialisasi**
(pangan, energi, air, konektivitas, pariwisata)



Inovasi

- penelitian, insentif riset, kebudayaan



Antisipasi Ketidakpastian

- Mitigasi risiko bencana
- pelestarian lingkungan & pengembangan EBT
- Stabilitas politik, hukum, dan hankam

Kegiatan prioritas dan strategis tahun 2020 (1)

I



Kartu Sembako

- Penggabungan bantuan pangan (BPNT) dengan bantuan tetap pada PKH
- Indeks meningkat
- Menyediakan komoditi pangan

II



KIP KULIAH

- Optimalisasi Bidik misi
- Perluasan target penerima dan/atau peningkatan indeks bantuan
- Kelanjutan dari KIP SMA/ sederajat

III



VOKASI

- Penguatan sinergi antar lembaga & peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui:
- (i) Penguatan BLK Komunitas,
 - (ii) Magang mandiri dalam/luar negeri, sertifikasi tenaga kerja, kerja sama dengan industri

IV



KARTU PRA KERJA

- Mendukung masyarakat miskin belum bekerja
- Dalam bentuk pelatihan kerja dan bantuan insentif pasca training (target 2 juta)
- Mengoptimalkan lembaga training masyarakat di KL dan swasta

Kegiatan prioritas dan strategis tahun 2020 ... (2)

V



KARTU INDONESIA SEHAT

- Melanjutkan pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional bagi rakyat miskin (PBI)
- Potensi perluasan Peserta dan Penyesuaian iuran
- Mendorong penyediaan layanan kesehatan berkualitas

VI



PERCEPATAN PENANGANAN *STUNTING*

- Penguatan konvergensi berbagai program kesehatan (pemberian gizi) dan non kesehatan (PAUD, sanitasi, air bersih)
- Fokus intervensi pada 260 Kabupaten/Kota
- Sinkronisasi program di 22 K/L (7 utama dan 15 pendukung)

VII



POLHUKHANKAM

- Menjaga stabilitas negara dalam mendukung berbagai program pembangunan yang dilaksanakan
- Memberikan rasa aman kepada masyarakat secara lebih profesional

VIII



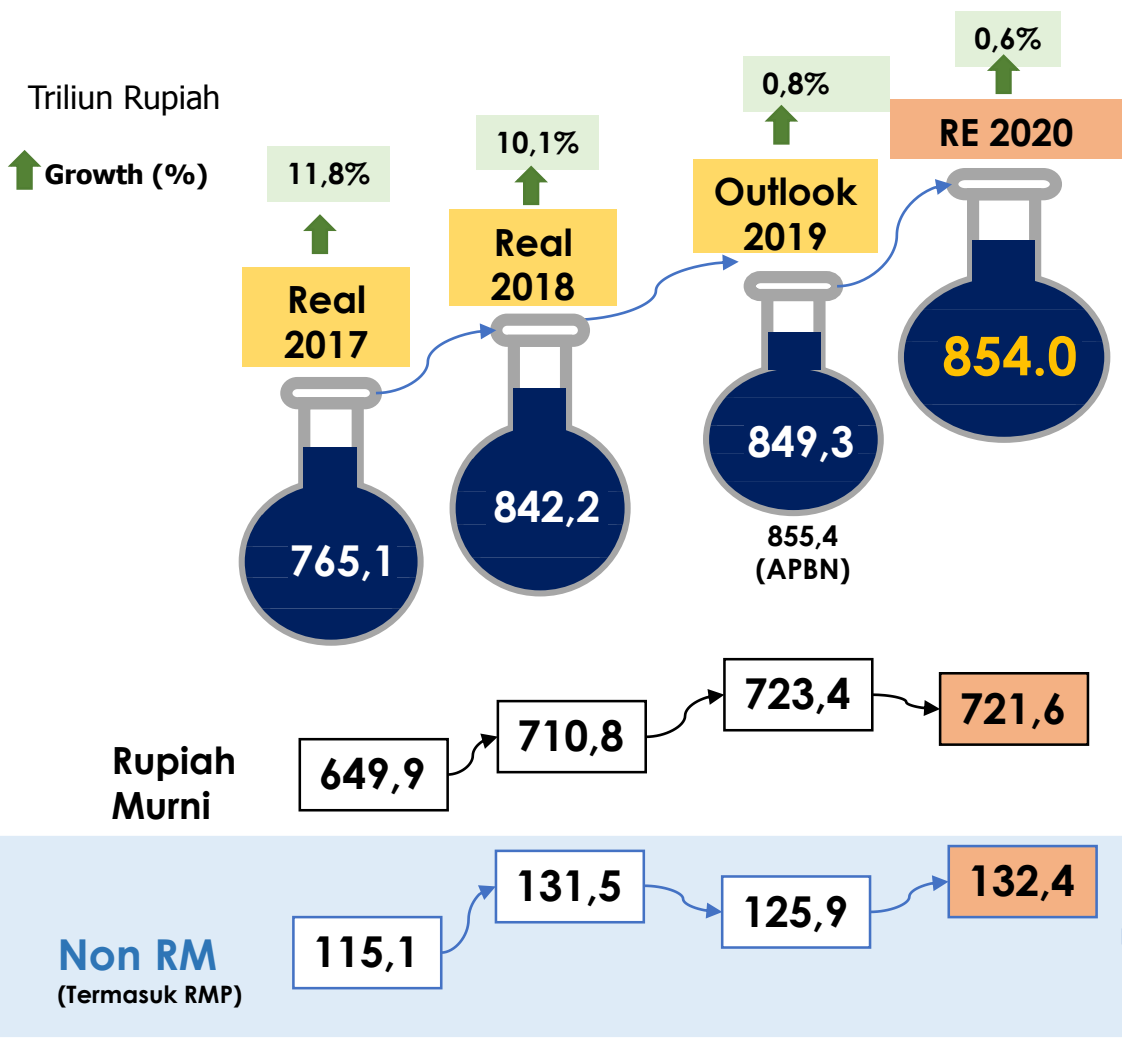
KEGIATAN PENELITIAN

- **Sinergi lintas K/L** baik dalam aspek **pendanaan** untuk riset, maupun **substansi** riset → menciptakan nilai tambah dan daya saing bangsa.
- Fokus pada 10 bidang riset: a.l. Pangan, Energi, Transportasi

Kegiatan prioritas dan strategis tahun 2020 ... (3)



Berdasarkan fokus dan upaya efisiensi dan penajaman belanja, Pagu Indikatif belanja K/L tahun 2020 sebesar Rp 854,0 triliun



Belanja K/L tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, melayani, mendukung penguatan daya saing SDM dan perlindungan sosial.

	2017	2018	2019 (outlook)	2020
- RMP	4,6	2,6	5,2	6,3
- PNBPNBP	21,8	23,6	26,7	27,1
- BLUBLU	40,5	41,4	45,5	42,9
- PHLN	24,1	25,9	19,8	22,3
- PHDN	7,0	18,5	1,2	3,0
- SBSN	17,1	19,3	27,0	30,8

tahun 2017 dan 2018 termasuk hibah langsung dalam/luar negeri

Tindak lanjut yang harus dilaksanakan... (1)

1. Perlu dilakukan **penajaman program dan kegiatan** oleh semua K/L, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Perlu **sinergi dan koordinasi antara K/L, Pemerintah Daerah, dan instansi lainnya**, seperti:
 - a. Sinergi di bidang Kesehatan antara Kemenkes, Pemda, dan BPJS
 - b. Sinergi penguatan Vokasi → *link and match* dengan kebutuhan Industri
 - c. Sinergi di bidang Pendidikan → keberlanjutan program pendidikan untuk masyarakat miskin sejak usia dini, SD, SMP, SMA, Kuliah, Kerja (PAUD, KIP, KIP Kuliah/Bidik Misi, Kartu Pra Kerja)
 - d. Sinergi pengembangan pariwisata → penyediaan sarana dan prasarana, transportasi, termasuk pemberdayaan masyarakat lokal
 - e. Sinergi pengembangan jaringan gas → efisien subsidi LPG
 - f. Sinergi pemenuhan kebutuhan pokok di perkotaan → penyediaan air bersih, sanitasi perumahan, dan pengelolaan sampah
3. Belanja operasional wajib **dialokasikan sesuai dengan kebutuhan**:
 - a. Belanja pegawai : pemberian gaji ke-13, THR, pengelolaan PNS dengan prinsip *zero growth*, memperhitungkan indeks kenaikan pangkat/golongan.
 - b. Belanja barang : Biaya pemeliharaan dengan standar biaya terbaru, Biaya pemeliharaan tambahan aset

Tindak lanjut yang harus dilaksanakan... (2)

4. Pengalokasian sumber dana non RM PHLN, PDN, PNBPN, BLU, dan SBSN **agar tetap** mengacu pada surat bersama Menkeu dan MenPPN/Ka. Bappenas tentang Pagu Indikatif K/L 2020
5. Alokasi anggaran pendidikan (sekurang-kurangnya 20% dari APBN) dan anggaran kesehatan (5% dari APBN), yang merupakan amanat UUD 1945 dan UU Kesehatan, **tidak boleh berkurang.**
- 6. Efisiensi belanja** K/L terutama perjalanan dinas, paket meeting, dan honorarium
7. Identifikasi proyek di masing-masing K/L yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU AP, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan dan capaian *output*
8. Alokasi per program, di luar yang bersifat wajib dipenuhi dan wajib dialokasikan, merupakan **ancar-ancar dan bersifat indikatif**, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian
9. Apabila ada usulan baru yang **lebih prioritas**, maka:
 - a. pendanaannya dilakukan dengan **penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada,**
 - b. didiskusikan/disepakati dalam forum ***trilateral meeting***.

Tahapan Pagu Indikatif menuju Pagu Anggaran membutuhkan koordinasi yang baik antara Kemenkeu, Bappenas dan KL

NO.	Uraian	Pihak Terkait	Substansi dan Hal Penting
1.	Penyusunan Renja K/L	K/L	<ul style="list-style-type: none"> ➤ K/L menyusun Renja berdasarkan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP ➤ K/L yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional, capaian kinerja program/kegiatan harus tercermin dalam umusan kinerjanya.
2.	Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting)	Kemenkeu, Bappenas, K/L	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan koordinasi dan kesepahaman 3 pihak terkait pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kebijakan belanja tahun 2020; • menjaga konsistensi kebijakan dalam RPJM, RKP, Renja K/L, serta RKA-K/L;
3.	Penyampaian Renja K/L kepada Kemenkeu dan Bappenas	Kemenkeu, Bappenas, K/L	K/L menyampaikan Renja dengan melakukan penyesuaian berdasarkan dokumen kesepakatan dalam forum Trilateral Meeting.
4.	Penyampaian KEM PPKF dan RKP 2020	Kemenkeu dan Bappenas	Menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah ke DPR → dasar penyusunan RAPBN 2020
5.	Pembicaraan Pendahuluan	Kemenkeu, Bappenas, K/L	Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, prioritas anggaran, serta rancangan RKP
6.	Penetapan Pagu Anggaran K/L	Kemenkeu dan Bappenas	Menteri Keuangan dan Ka. Bappenas menyampaikan surat pagu anggaran K/L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja K/L, dan hasil evaluasi kinerja K/L.

Penutup



Pagu Indikatif 2020 diterjemahkan ke dalam Renja K/L dan dibahas dalam forum *trilateral meeting* antara Kemenkeu, Bappenas dan Kementerian/Lembaga.



- ❑ Fokus pada upaya untuk memenuhi target prioritas pembangunan nasional, efisien, dan peningkatan pelayanan.
- ❑ Apabila terdapat kebutuhan strategis/ mendesak/ *urgent*, → mengoptimalkan pagu indikatif di masing-masing K/L serta diusulkan internal Pemerintah terlebih dahulu → mendapat direktif Presiden



Mempertimbangkan keterbatasan waktu, proses penyusunan Renja K/L dan *trilateral meeting* dapat dilakukan secara efisien dan efektif



Dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun 2020 (**Mei-Juni 2019**), K/L agar tetap berpedoman pada kebijakan yang sudah ditetapkan dalam KEM & PPKF dan Rancangan RKP 2020



KEMENTERIAN KEUANGAN

Terima Kasih

